



Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun

Hafzana Bedasari¹ Endang Tri Wahyuni²

Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
deriebedasari@universitaskarimun.ac.id endangtriwhyni26@gmail.com

Received : September 29, 2020; Accepted : October 20, 2020

DOI 10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973

Abstract

This research is backgrounded by one of the people with social welfare problems in homeless and beggars whose one factor is poverty, social services karimun district through social service regulations make policy a program in dealing with social welfare problems. This study aims to find out more about the implementation of government program policies in addressing social welfare problems in homeless and beggars and to know the factors that influence the implementation of government program policies in dealing with social welfare problems in homeless and beggars in karimun district. Data collection techniques used are unstructured interviews and Field Observation and Documentation. Data sources are obtained by using secondary and primary data. Data analysis used in this research is qualitative data analysis method. From the results of this study obtained an idea that the overall Implementation of Social Service Program Policy on People with social welfare problems in Homeless and Beggars in Karimun Regency, namely: Transmission, Clarity, Consistency, Human Resources, Budget resources, Equipment Resources, Authority Resources, Bureaucratic Appointments, Incentives, Standard operational procedure (SOP), Fragmentation, then from the indicators can be known that the implementation of social service program policy towards people with social welfare problems in homeless and beggars in Karimun Regency has been running well in accordance with the results of research from interviews with 5 key informants as a source of data selected deliberately (purposive sampling) namely, Head of social rehabilitation, Head of social rehabilitation section of people with disabilities and social tuna, Social problems rehabilitation analyst, Satpol PP, Bum and beggars. Supporting factors that influence the implementation of the program policy karimun Social Service Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

Key Words : Social Services, bums, beggars.

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis yang salah satu faktor nya adalah kemiskinan, Dinas sosial kabupaten karimun melalui peraturan Dinas Sosial membuat kebijakan sebuah program dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam terkait Implementasi kebijakan program pemerintah dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan Observasi lapangan dan Dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder dan data primer . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini di peroleh gambaran bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten karimun , yaitu : Transmisi ,Kejelasan,Konsistensi, Sumber daya manusia, Sumber daya anggaran, Sumber daya peralatan, Sumber daya kewenangan, Pengangkatan birokrasi, Insentif, Standart operational

procedure (SOP), Fragmentasi, maka dari indikator tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan program Dinas Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Wawancara dengan 5 Informan kunci sebagai sumber data dipilih secara sengaja (purposive sampling) yakni, Kepala bidang rehabilitasi sosial, Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, Analis rehabilitasi masalah sosial, Satpol PP, Gelandangan dan pengemis. Faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi kebijakn program Dinas Sosial kabupaten karimun Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Key Words : Dinas Sosial, Gelandangan, Pengemis.

Pendahuluan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi baik di Negara maupun daerah , salah satu faktor sebab kemiskinan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, pengetahuan yang luas, dan kurang nya tingkat pendidikan.

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu Gelandangan dan Pengemis masih banyak nya dapat ditemui di beberapa tempat, lampu merah , pasar yang masih banyak kehadiran para Gelandangan dan Pengemis.

Pada pasal 34 ayat (1) di dalam Undang-undang dasar menyebutkan bahwa fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki hak yang penuh terhadap kehidupan yang layak dari Negara seperti tercukupnya kebutuhan jasmani maupun rohani.

Masalah yang terjadi masih banyak nya angka kemiskinan dengan adanya para gelandangan dan para pengemis yang masih mencari nafkah dijalan- jalan baik dewasa maupun anak-anak makin bertambah setiap waktu nya. Sehingga program yang di lakukan tidak bisa membuat angka para gelandangan dan pengemis menurun.

Jumlah data gelandangan dan pengemis di kabupaten karimun menurut Dinas Sosial pada tahun 2018 sejumlah 25

orang. Pada tahun 2019 tidak menurun angka yang terdata malah bertambah jumlahnya menjadi 26 orang yang terdiri dari masyarakat dalam karimun dan luar karimun.

Alasan yang dilakukan mereka karna memilih menjadi gelandangan dan pengemis karna tidak adanya pekerjaan dan kurangnya pengetahuan di dunia pekerjaan keterbatasan pengetahuan yang ingin dikerjakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Dinas Sosial telah menanggapi serius terkait permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam program kegiatan, antara lain:

1. Penyuluhan sosial ditempat gelandangan dan pengemis.
2. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga.
3. Mendirikan pos pelayanan gepeng untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangingan, rujukan bagi gepeng untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi.
4. Razia dipergunakan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjaring gepeng dan ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi.

5. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gepeng.

Permasalahan PMKS melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petugas Penjangkauan Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Tuna Sosial lainnya di Kabupaten Karimun. Petugas-petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Penjangkauan terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan tuna sosial lainnya di Kabupaten Karimun.
2. Melakukan assesmen terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Sosial.

Dengan melihat kondisi yang terjadi serta data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karimun khususnya terkait dengan permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng), penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan suatu kepandaian, kemahiran. secara umum istilah kebijakan didefinisikan adalah serangkaian rencana suatu program, keputusan, dan sikap. untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) , untuk penyelesaian masalah yang

dihadapi.sebagaimana tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.(iskandar,2002).

Kebijakan publik merupakan suatu hal yang dilakukan dalam suatu kegiatan tertentu yang diperoleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Implementasi menurut Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Dalam derajat lain Daniel Mazmainian dan Paul Sabatier dalam

bukunya *implementation Public Policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan Publik sebagai: “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk Perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Proses implementasi Kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Misalnya perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai “policy outcome” atau dampak akhir kebijakan, dan dampak segera kebijakan proses pelaksanaan kebijakan “*policy impact*”. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy performance” yang diperoleh.

Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang mempunyai hambatan, kesulitan, maupun gangguan sehingga tidak dapat melakukan fungsi sosial membuat kehidupan tidak terpenuhi baik jasmani maupun rohani. Hambatan yang terjadi maupun gangguan berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan bencana alam maupun bencana sosial saat

ini adanya 22 jenis PMKS yang terjadi di Indonesia menurut Kementerian Sosial. Pengemis, orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, Gelandangan, orang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pecarian dan tempat tinggal yang tetap.

Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu :

1. sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya
2. orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan
3. orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian

pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal.

Sedang Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum. (N.F Kesumawindayati, C.Sahuri, 2011)

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun M. Syahrudin, S.Sos, M.Si pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dan mengharap belas kasihan dari orang lain. Secara garis besar pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria yang dapat diberikan antara lain :

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun. Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
2. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan ayat-ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
3. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai

cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis di muka umum . (N.F Kesumawindayati, C.Sahuri, 2011).

Metode

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (field research), yaitu data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017). Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial terhadap PMKS khususnya yang menyangkut tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun..

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana implementasi kebijakan program pemerintah (Dinas Sosial) terhadap penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan Sosial pada gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Karimun

Untuk membahas program Dinas Sosial terhadap masalah kesejahteraan sosial pada Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Karimun, maka penulis menganalisisnya dengan melakukan Wawancara diantaranya yaitu mengenai berbagai macam program yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

1. Penyuluhan sosial ditempat gelandangan dan pengemis.

Dengan adanya program penyuluhan sosial ditempat beradanya para Gelandangan dan Pengemis merupakan faktor untuk mendata dan

memberi himbauan di Radio Canggai Putri agar masyarakat Kabupaten Karimun tidak memberikan sedekah berbentuk uang kepada para pengemis dan Gelandangan, dengan adanya program tersebut dapat membantu mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis.

2. Penguatan Keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan Pendidikan, lapangan kerja, dan pendapatan keluarga.

Dengan adanya program kegiatan tersebut suatu masalah kesejahteraan sosial karena faktor kemiskinan kemungkinan dapat mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Karimun, karena penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan , lapangan pekerjaan serta pendapatan keluarga yang mencukupi merupakan faktor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masalah tersebut merupakan masalah yang menjadi alasan mengapa para pengemis dan gelandangan masih tetap melakukan pekerjaannya. Faktor ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan keadaan kemiskinan tetap meningkat.

3. Mendirikan Pos pelayanan Gepeng untuk memberikan konsultasi, pendataan, Penjaringan, Rujukan bagi Gepeng untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi

Dengan mendirikan pos pelayanan bagi pelayanan Gepeng maka tempat memberikan arahan agar para gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi ke jalan dan mencari solusi setelah dilakukan pendataan nama, tempat tinggal asal tempat tinggal yang sekarang dan bisa dikembalikan ke keluarga dan ke daerahnya bagi yang dari luar karimun.

4. Razia dipergunakan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjaring gepeng dan ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi

Adanya program Dinas Sosial dilakukannya Razia merupakan langkah akhir mengatasi masalah yang terjadi menyebabkan keresahan masyarakat dan mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan faktor negative maka dilakukannya penertipan umum, dan barak penampungan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun Pos Satpol PP dan hanya ada Rumah Perlindungan Sosial "Tali Kasih" yang berada di daerah Balai Garden yaitu tempat penampungan sementara.

5. Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gepeng

Program yang dijalankan dalam melakukan kerja sama dengan dunia usaha belum dapat terlaksana karena keadaan para pengemis dan gelandangan kurangnya pengetahuan dalam pendidikan serta keadaan yang tak memungkinkan dan para gelandangan dan pengemis lebih memilih memintaminta dengan penghasilan yang lebih jelas dalam per-harinya. Para gelandangan dan pengemis yang masih mempunyai keluarga dikembalikan lagi kepada keluarganya dan diberikan bantuan jika memang keadaannya kesusahan akan tetapi jika pengemis dan gelandangan tidak lagi mempunyai keluarga maka dimasukkan ke tempat rehabilitasi sosial swasta yang ada di Bintan dengan dibayarkan anggaran dari Dinas Sosial.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah (Dinas Sosial) terhadap penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Karimun

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi suatu kebijakan Program Dinas Sosial Kabupaten karimun terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun peneliti melalui teori George C. Edward III ditemukan proses Implementasi kebijakan dalam 4 (Empat) Faktor yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi kebijakan pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara sosialisasi di Radio canggai putri oleh Dinas Sosial terkait permasalahan memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis dijalanan, sosialisasi itu bersifat himbuan kepada masyarakat, serta melakukan penertiban dijalanan yang dilakukan pada sasaran Gelandangan dan Pengemis. Sosialisasi dalam konteks penelitian berkaitan dengan transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Dimana transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Penyampaian informasi kebijakan program Dinas Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis Kabupaten karimun yang melalui

Radio Canggai putri, dan melakukan penertiban dijalanan umum pada kenyataannya masih di temukan para pengemis dan Gelandangan yang berada di sekitar tempat umum, Pasar maupun pelabuhan. Para gelandangan dan pengemis sering mendapatkan berita kabar bocoran ketika akan di razia penjangkauan, sehingga pada saat turun ke lapangan gepeng yang dikabarkan tidak sesuai dengan pada saat dilakukannya penurunan.

b. Kejelasan

Faktor kedua adalah kejelasan. Indikator kejelasan komunikasi juga merupakan elemen yang penting. Kejelasan komunikasi menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi tidak kalah pentingnya juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan yang disampaikan akan mendorong terjadinya kesalahpahaman bahkan mungkin bertentangan dengan makna atau tujuan pesan awalnya.

c. Konsistensi

Faktor ketiga adalah konsisten. Konsisten sangat berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah

tersebut bertentangan maka pemerintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Konsistensi khususnya tentang kebijakan pada Gelandangan dan pengemis melalui keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2019 tentang pentugas penjangkauan Gelandangan, pengemis, Anak jalanan dan Tuna sosial lainnya Di Kabupaten Karimun. Sudah dijalankan meskipun pada pelaksanaannya belum optimal.

2. Sumber Daya

George Edwards III menjelaskan mengenai sumber daya yang dimaksud berhubungan dengan Staf, Informasi, Kewenangan dan Fasilitas keempat hal tersebut disebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, tujuan kebijakan yang telah direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, persiapan implementasi program Pemerintah (Dinas Sosial) dalam menangani masalah Gelandangan dan Pengemis membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan

program. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Karimun, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Sumber daya anggaran

Berdasarkan pengamatan penelitian dalam sumber daya anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam menangani masalah Gelandangan dan Pengemis karena terbatasnya anggaran yang dimiliki apabila melakukan penertiban dan razia setiap hari maka anggaran yang diperlukan harus ada karena untuk memfasilitasi para Gelandangan dan Pengemis setelah pendataan bagi para Gelandangan dan Pengemis yang berada di Karimun dikembalikan kepada keluarganya dan kepada para Gelandangan dan Pengemis dari daerah luar Karimun dikembalikan ke asalnya, dengan menggunakan anggaran dari Dinas Sosial.

c. Sumber daya peralatan (Fasilitas)

Berdasarkan pengamatan peneliti, fasilitas untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun sudah memadai. Karena wilayah tempat kecil maka tidak diperlukanya banyak mobil untuk penertiban, dengan alur kordinasi Dinas Sosial-Satpol PP, Mobil penjemputan dibawah fasilitas Satpol PP. sehingga Dinas Sosial tidak membutuhkan mobil penjemputan sendiri. Dan untuk fasilitas lain, dinas sosial tidak memiliki Panti sosial dan panti sosial di Kepri hanya ada di Bintan Karena kurangnya Lahan yang harus dibangun dimintak 1 Hektar dari

pusat di Karimun untuk membuat panti sosial maka pembangunan tersebut belum bisa terlaksanakan.

d. Sumber daya kewenangan

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui wawancara sumber daya kewenangan pada Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Kabupaten Karimun hanya mempunyai wewenang melakukan pendataan dan pemulangan kepada para Gelandangan dan Pengemis yang memiliki wewenang dalam penangkapan dan penertiban adalah Satpol PP, pihak Dinas Sosial Kabupaten Karimun ikut mendampingi dan mendata setelah di mintai keterangan Dinas Sosial mengembalikan kepada keluarga dan diberikan arahan serta surat perjanjian agar tidak kembali lagi ke jalanan.

3. Disposisi (Sikap/Kecenderungan)

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk

mengimplementasikan kebijakan. Kesiapan dalam menjalankan Implementasi Kebijakan program yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Gelandangan dan Pengemis dengan menanggapi serius pemerintah daerah melalui dinas sosial tentang penjangkauan gelandangan dan pengemis dengan ditunjuk pentugas melakukan tugas – tugas nya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terdiri dari pembagian wewenang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Dinas Sosial Kabupaten Karimun tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Anggota, dan Kepala Bidang/Bagian. Dengan ditetapkannya struktur organisasi akan memperjelas sekaligus memisahkan tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bidang/bagian dalam melaksanakan pekerjaannya dari awal sampai akhir dalam suatu sistem (Standar Operasional Prosedur /SOP) yang mampu mengatur arus kerja dan hasil kerja menjadi lebih baik disamping memudahkan pengawasan serta koordinasi dari masing-masing bidang/bagian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan judul “Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun peneliti menemukan bagaimana penerapan program Implementasi kebijakan pada Dinas Sosial pada Kabupaten Karimun antara lain

1. Seperti penyuluhan sosial, penguatan keluarga, mendirikan pos pelayanan dan Razia dari keseluruhan hasil program yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten karimun : ada beberapa program yang belum bisa terlaksanakan karena faktor keadaan para gelandangan dan pengemis bukan berasal dari daerah Kabupaten karimun akan tetapi banyak yang berasal dari luar kabupaten karimun , hal tersebut berdarakan hasil Wawancara dan observasi peneliti bersama informan. Program yang belum dijalankan di Dinas sosial Kabupaten karimun yaitu kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja para gelandangan dan pengemis karena faktor pengetahuan yang kurang mengetahui di dunia pekerjaan dan karena banyak berasal bukan dari Kabupaten karimun, menurut observasi di lapangan saat melakukan penjangkauan bersama Dinas sosial kabupaten karimun.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi : implementasi kebijakan program pemerintah Dinas Sosial terhadap penanggulangan penyandang masalah kesejahtraan sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun, Peneliti juga menemukan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga menerapkan beberapa Implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu :
 - Transimisi : Dinas Sosial Kabupaten karimun melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Radio canggai putri untuk tidak memberikan uang kepada para gelandangan dan pengemis dan jika ingin bersedekah bisa dilakukan dimesjid, panti asuhan. Faktor ini digunakan agar para gelandangan dan pengemis merasa pendapatan yang di dapatkan kurang dan para

gelandangan dan pengemis dari luar daerah bisa kembali ke daerah nya kembali.

- Kejelasan : Kejelasan merupakan faktor pendukung bagi dinas sosial dalam menyampaikan informasi pada saat dilakukan penjangkauan informasi tersebut seperti berbentuk pengetahuan kepada para gelandangan dan pengemis, informasi tersebut biasanya dilakukan di tempat perlindungan sosial yang berada di Balai garden, pengemupulan ini dilakukan setelah melakukan pendataan.
- Konsistensi : di dalam Dinas Sosial Kabupaten Karimun adanya peraturan kepala dinas sosial Nomor 13 Tahun 2019, yang menjadi panduan bagi pelaksanaan kegiatan penjangkauan pada gelandangan dan pengemis, dan program tersebut sudah dijalankan meskipun belum optimal.
- Sumber daya manusia : sumber daya manusia pada Dinas sosial kabupaten karimun yang mempunyai 8 pada bidang nya yang termasuk orang di Dinas Sosial Kabupaten karimun dan Satpol PP dibidang pentugas penjangkauan gelandangan, pengemis merupakan sumber daya yang cukup dalam menjalankan penerapan penjangkauan pada penyandang masalah kesejahtraan sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun, dan pada saat penjangkauan yang memerlukan Polisi karena takut akan terjadi tindakan kriminal.
- Sumber daya anggaran : anggaran yang digunakan pada saat dilakukannya penjangkauan menggunakan dana Dinas Sosial Kabupaten Karimun, pada saat di

pulangkan nya para gelandangan dan pengemis yang berada dari luar karimun di biayai hingga ke daerah nya. Anggaran bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bukan hanya untuk permasalahan pada gelandangan dan pengemis akan tetapi anggaran tersebut di bagi-bagi dan digunakan jika masalah sosial yang lebih di butuhkan.

- Sumber daya kewenangan : Dinas sosial mempunyai kewenangan dalam hasil akhir dalam pendaataan dan pemulangan para gelandangan dan pengemis yang di pulangkan ke daerah nya dan pada keluarga nya, faktor ini dilakukan agar gelandangan dan pengemis lebih di lindungi kembali jika ada faktor ekonomi dari daerah Kabupaten Karimun di bantu Dinas Sosial.
- Disposisi : alasan nya dilakukan penjangkauan pada gelandangan dan pengemis merupakan sikap Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan pasal 34 ayat (1) di dalam Undang-undang dasar yang menyebutkan bahwa fakir miskin, anak terlantar di pelihara oleh Negara . pada dasarnya mereka mempunyai hak penuh untuk di lindungi untuk kehidupan yang layak dari Negara, maka tujuan Dinas sosial melakukan penjangkauan agar tidak ada nya lagi faktor ekonomi yang menjadi alasan pengemis dan gelandangan tetap dijalan, dan alasan mengapa mereka tetap berada dijalan dari hasil wawancara peneliti dengan pengemis karena faktor ekonomi.
- Standart operational procedure (SOP) : merupakan faktor penting dalam suatu organisasi maupun pemerintah agar suatu pelaksanaan Implementasi kebijakan lebih

mengetahui tentang kedudukan tugas dan fungsi. SOP di Dinas Sosial Kabupaten Karimun berbentuk keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2019 tentang penjangkauan Gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun.

- Fragmentasi : memiliki tanggung jawab yang bersama- sama dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Karimun baik dari Bidang nya maupun bukan dari bidangnya, karena tanpa adanya kerja sama maka suatu Implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan.
3. Faktor penghambat : yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah Dinas Sosial terhadap penangulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun, Peneliti juga menemukan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Karimun :
- Sumber daya peralatan : peralatan yang digunakan seperti Transportasi yang digunakan menggunakan trnsnsportasi dari Satpol PP dalam melakukan penjangkauan pada gelandangan dan pengemis dan Tempat Panti sosial yang belum ada di Kabupaten Karimun sebagai salah satu tempat untuk penampungan para gelandangan dan pengemis agar lebih mengasahkan kemampuan dan bisa mengembangkan pekerjaan yang bisa dilakukannya tanpa harus turun ke jalan-jalan kembali, dan tempat panti sosial yang berada di Kepri hanya ada di Bintan dan panti sosial tersebut pun Swasta memerlukan Biaya.

Daftar Pustaka

- Agustino,Leo.2012 Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV Alfabeta : Jakarta.
- Al Fatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat Bandung : UNPAD Press.
- Anggara, Sahaya.2014. Kebijakan Publik , Bandung :Pustaka Setia.Jakarta.
- Budi Winarno.2012 Kebijakan Publik Teori,Proses,dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia, 2010. Jkarta. Pustaka Amani Nugroho,Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno,2010. Dasar-dasar kebijakan publik (Kajian proses dan analisis kebijakan). Yogyakarta : UNY Press
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016.
- Solichin Abdul Wahab, Haji . Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta Bumi Aksara, 2017.
- Widodo,Joko.2011.Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang : Bayu Media.
- Winarno,Budi.2012 Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pessindo.

Dokumen

- Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2019